

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia dan perkembangan teknologi yang pesat mendorong Indonesia untuk melakukan adaptasi dengan teknologi internet. Sejak kemunculannya, internet selalu menarik perhatian masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Meskipun tergolong sebagai teknologi yang baru, internet berhasil memikat penggunanya dengan terus menghadirkan inovasi yang membuatnya relevan digunakan dalam jangka waktu panjang. Salah satu aspek penting yang lahir dari internet dan memiliki pengaruh besar di seluruh dunia adalah media sosial yang telah menjadi alat terkini yang memberikan dampak yang bisa dibilang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah politik global secara umum dan politik Indonesia secara khusus.

Di era sekarang, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Hal ini terlihat dari maraknya pemanfaatan media sosial dalam berbagai kegiatan Pemilu, terutama sebagai alat komunikasi politik. Komunikasi politik sendiri diartikan sebagai proses penyampaian informasi, baik berupa fakta, opini, keyakinan, dan sebagainya, serta pertukaran dan pencarian informasi tersebut dilakukan oleh pelaku politik dalam konteks kegiatan politik yang lebih terstruktur.

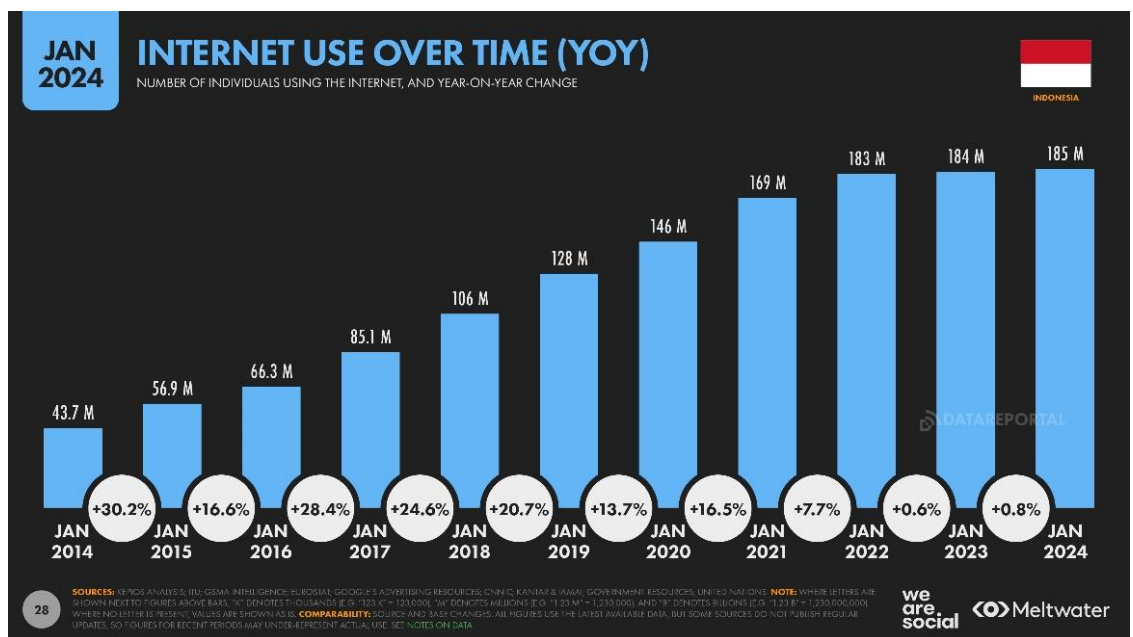
Media sosial telah merevolusi cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Dengan cara menyebarkan informasi secara cepat dan luas, media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini tentang isu-isu politik, calon pemimpin, serta kebijakan publik melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi interaksi langsung antara warga dengan para politisi, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka secara lebih terbuka.

Kemenangan Barack Obama pada pemilihan presiden Amerika Serikat sebanyak dua kali merupakan salah satu contoh nyata bagaimana media sosial dapat memengaruhi hasil pemilu. Kampanye Obama secara efektif memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, membangun basis pendukung yang kuat, dan menggalang dana kampanye. Penggunaan media sosial oleh kampanye Obama telah menginspirasi banyak kampanye politik di seluruh dunia, menunjukkan potensi besar media sosial dalam rangka membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku politik.

Seiring pesatnya perkembangan internet, media sosial pun ikut berkembang pesat. Media sosial merupakan hasil dari kemajuan pesat teknologi internet. Kemunculan internet beberapa dekade lalu telah mendorong perkembangan media sosial dengan sangat cepat, bahkan menghadirkan berbagai fitur dan manfaat baru bagi penggunanya. Media sosial kini menjadi salah satu kanal informasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada

pertukaran informasi, tetapi banyak juga yang memanfaatkan media sosial untuk berbisnis serta kegiatan lainnya. Media sosial hadir sebagai *platform* yang menyediakan berbagai fasilitas bagi penggunanya, yaitu masyarakat, untuk melakukan aktivitas sosial (Wasesa, 2011). Aktivitas-aktivitas sosial tersebut dapat berupa komunikasi dan interaksi sosial dengan cara mengirim pesan, foto, video, dan sebagainya.

Gambar 1.1 Perkembangan penggunaan internet di Indonesia



Sumber : We Are Social (2024)

Penggunaan teknologi internet di Indonesia terus berkembang. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 43,7 juta jiwa, meningkat menjadi 56,9 juta jiwa pada 2015, pada tahun 2016 menjadi 66,3 juta jiwa, pada tahun 2017 berjumlah 85,1 juta

jiwa, pada tahun 2018 berjumlah 106 juta jiwa, dan pada tahun 2019 pengguna internet di Indonesia mencapai 128 juta jiwa hingga pada tahun 2024 mencapai 185 juta jiwa.

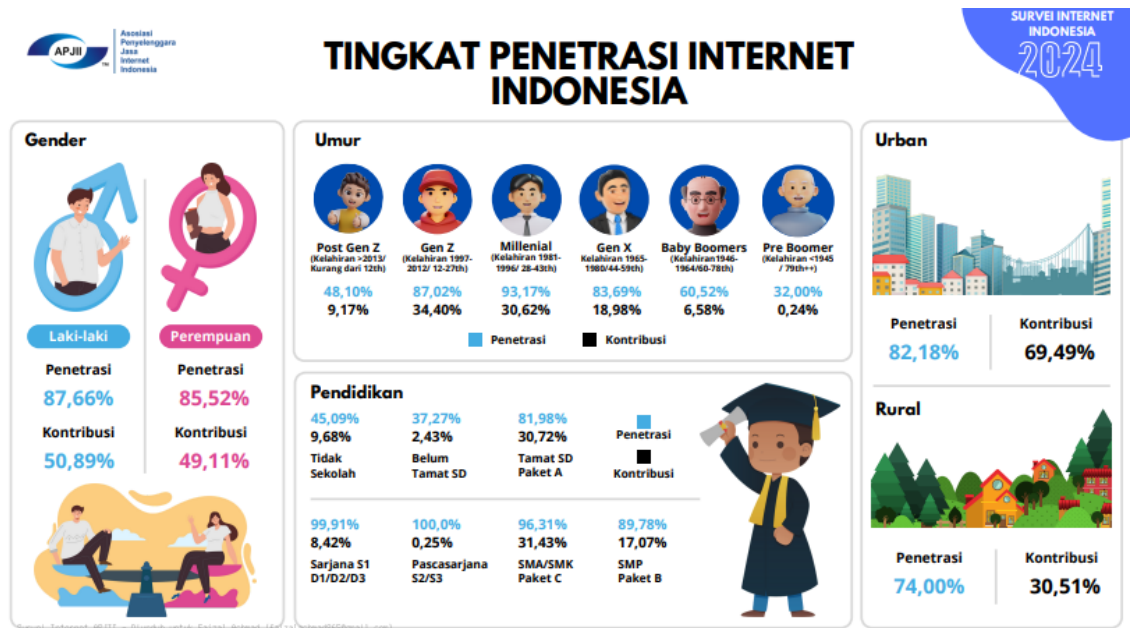
Gambar 1.2 Jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia



Sumber : We Are Social (2024)

Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai 139 juta jiwa pada tahun ini. Ini menunjukkan tren yang semakin meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia.

Gambar 1.3 Tingkat penetrasi internet di Indonesia



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2024)

Generasi Z, yang mencakup individu-individu yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012, telah menjadi kelompok dominan dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini. Fenomena ini didukung oleh data survei yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang mengungkapkan bahwa hampir separuh pengguna internet di Indonesia berada dalam rentang usia 12 hingga 27 tahun, dengan kontribusi signifikan sebesar 34,40%. Angka tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memainkan peran krusial dalam ekosistem digital Indonesia.

Diproyeksikan, angka pengguna internet dan media sosial dari kelompok usia muda ini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses digital. Tren ini juga selaras

dengan dinamika bonus demografi yang dialami Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan terus meningkat sepanjang periode 2020 hingga 2035. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia, untuk memanfaatkan potensi generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Pew Research Center, sekelompok peneliti menemukan bahwa kehidupan Generasi Z berkaitan erat dengan internet. Generasi ini tumbuh dalam era digital yang telah mentransformasi pola interaksi, akses informasi, dan cara mereka menjalani keseharian. Selain menjadi pengguna aktif teknologi, Generasi Z juga menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap hiburan dan budaya pop, seperti musik, yang kini tidak sekadar menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi bagian integral dari kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam konteks politik, media sosial memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Platform-platform digital ini telah berkembang menjadi elemen penting dalam lanskap politik modern. Media sosial bukan hanya menjadi sarana bagi pihak penguasa untuk mempertahankan status quo melalui narasi yang mendukung legitimasi mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis bagi pihak oposisi untuk menyuarakan kritik dan menyebarkan gagasan alternatif. Dengan daya jangkau yang luas dan kemampuannya menyatukan audiens lintas batas geografis, media sosial telah mentransformasi cara interaksi

politik berlangsung, menjadikannya lebih dinamis, inklusif, sekaligus kompetitif.

Generasi Z mempunyai suatu potensi besar sebagai kekuatan politik dengan jumlah mereka yang signifikan dalam demografi global maupun nasional. Kehadiran mereka memberikan harapan terhadap peningkatan tingkat keaktifan dalam partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi politik, sebagaimana didefinisikan oleh Nur dan Sukma (2018), mencakup berbagai aktivitas individu, organisasi, atau kelompok yang berperan dalam proses politik, baik secara tidak langsung maupun langsung. Aktivitas ini meliputi pemungutan suara, kampanye, hingga keterlibatan dalam diskusi publik terkait kebijakan.

Peningkatan partisipasi politik Generasi Z menunjukkan indikasi positif terhadap kesadaran masyarakat, terutama kelompok muda, akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif ini juga menjadi cerminan dari meningkatnya pemahaman mereka terhadap isu-isu politik, baik lokal maupun global. Dengan dukungan akses informasi yang melimpah melalui internet dan media sosial, Generasi Z mempunyai potensi dalam menjadi penggerak perubahan, memberikan perspektif segar dalam pengambilan keputusan politik, dan mendorong perubahan sosial dalam rangka menuju masyarakat yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Partisipasi politik memiliki berbagai definisi yang menyoroti dimensi-dimensi aktivitas warga negara dalam keterlibatan politik, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Menurut Sitepu (dalam Wardhani Nur, 2018), partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kelompok yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Aktivitas ini dapat dilakukan secara langsung, seperti melalui pemilihan calon pemimpin, atau secara tidak langsung, misalnya dengan memengaruhi kebijakan pemerintah melalui opini publik atau kegiatan advokasi.

Definisi lain dikemukakan oleh Verba dan Nie (dalam Andriyendi, 2023), yang menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah aktifitas warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilihan pemimpin demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara kolektif. Perspektif ini menekankan pada tujuan partisipasi politik sebagai sarana untuk menciptakan dampak positif bagi komunitas yang lebih luas.

Gaventa dan Valderama (dalam Andriyendi, 2023) menambahkan yaitu partisipasi politik melibatkan tindakan politik, seperti contoh kampanye, yang melibatkan individu atau kelompok organisasi, terutama partai politik dan institusi negara. Tujuan dari tindakan-tindakan ini adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, memperkuat demokrasi, serta memastikan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, Huntington dan Nelson (dalam Budiarto, 2012) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dengan maksud untuk

memengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah. Definisi ini menyoroti keterlibatan warga negara dalam memengaruhi arah dan isi kebijakan publik, baik melalui mekanisme formal seperti pemilu maupun melalui saluran informal seperti protes dan advokasi.

Secara keseluruhan, partisipasi politik mencerminkan komitmen individu dan kelompok terhadap proses demokrasi dengan tujuan menciptakan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, partisipasi politik bisa dianggap sebagai elemen fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu. Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu merupakan kontribusi langsung terhadap sistem demokrasi, di mana pemilih memiliki peran penting dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Pemimpin yang terpilih diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat melalui kebijakan yang pro-rakyat dan transparan.

Salah satu segmen pemilih yang membutuhkan perhatian khusus adalah pemilih pemula. Istilah ini mengacu pada individu yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pertama kali. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018 mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri untuk Penyelenggaraan Pemilu, pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah menikah, memiliki hak untuk memilih. Dengan demikian,

pemilih pemula meliputi WNI yang telah genap berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara serta memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan pemilih pemula menjadi sangat relevan dalam kajian partisipasi politik, mengingat mereka merupakan kelompok yang baru pertama kali terlibat dalam proses demokrasi yang menentukan arah masa depan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami motivasi, pola pikir, dan kecenderungan politik dari pemilih pemula untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi di Indonesia.

Istilah "media sosial" terbentuk dari dua kata, yaitu "media" dan "sosial". Laughey menjelaskan dengan sederhana bahwa "media" merujuk pada alat komunikasi yang telah dikenal luas oleh masyarakat, yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Sementara itu, Fuchs (dalam Nasrullah, 2015: 3-6) menyatakan bahwa kata "sosial" berkaitan dengan proses penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, "sosial" menggambarkan interaksi antarindividu atau kelompok yang terjadi melalui platform media, yang memungkinkan terciptanya ruang untuk diskusi, pertukaran gagasan, serta partisipasi aktif dalam berbagai isu.

Saat ini, hampir seluruh kelompok masyarakat di dunia telah memanfaatkan media sosial sebagai fasilitas utama untuk komunikasi dan

berbagi informasi. Sejak pertama kali diperkenalkan, media sosial telah menjadi revolusi dalam cara orang berinteraksi, mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat dan luas, tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Media sosial merupakan sarana daring yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif, berbagi, menciptakan berbagai jenis konten.

Di antara berbagai bentuk media sosial yang ada, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan platform yang ter banyak digunakan oleh orang-orang. Setiap jenis media sosial ini menawarkan fungsionalitas yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni memfasilitasi komunikasi terbuka dan interaktif antarindividu, serta memperkuat jaringan sosial di tingkat global (Cahyono, 2016: 142).

Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa media sosial merupakan platform berbasis internet yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara virtual. Berdasarkan pemaparan tersebut, media sosial bisa dianggap sebagai sarana komunikasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam menghubungkan individu, memfasilitasi interaksi, dan pertukaran informasi secara luas.

Gen Z menjadi kelompok yang sangat menarik untuk dibahas di Indonesia, terutama dalam konteks kepemiluan. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sekitar 22,85 % dari total DPT Pemilu 2024 terdiri dari Gen Z (Muhamad,

2023). Dalam struktur DPT Pemilu 2024, Generasi Z ada di tempat kedua setelah Generasi Millennial, menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki potensi suara yang signifikan dalam menentukan arah politik negara. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa Gen Z merupakan generasi terbesar di Indonesia, mencapai 27,94 % dari total populasi (Evita, 2023).

Dalam konteks kepemiluan, Generasi Z diperkirakan akan menjadi kelompok dengan pengaruh suara yang besar. Nurhasim (2023) mengatakan bahwa pada tahun 2039 mendatang, masa politik Generasi Millennial akan berakhir, dan akan beralih sepenuhnya kepada Gen Z serta Generasi Alpha. Prediksi ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya akan memiliki peran signifikan dalam Pemilu 2024, tetapi juga akan menjadi aktor utama dalam dinamika politik Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia mencapai angka 81,9 % (Hamonongan, 2022). Pencapaian ini dianggap sebagai tolok ukur penting yang perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada Pemilu 2024. Salah satu target utama dalam Pemilu 2024 adalah tidak hanya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, tetapi juga fokus pada peningkatan kualitas pemilihnya. Jika dilihat dari konteks demokrasi dan kepemimpinan, peningkatan kualitas pemilih, khususnya di kalangan Gen Z, menjadi harapan besar. Peningkatan jumlah suara dari Generasi Z tidak hanya merupakan angka statistik semata, tetapi juga langkah strategis dalam mempersiapkan mereka

untuk menjadi pemilih yang lebih matang dan bijaksana, siap menghadapi transisi kepemimpinan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2039.

Dengan demikian, memahami dinamika politik Generasi Z dan meningkatkan partisipasi serta kualitas suara mereka dalam Pemilu 2024 akan menjadi langkah krusial untuk membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh di Indonesia, yang dapat memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Penelitian mengenai hubungan diantara penggunaan media dan partisipasi politik menunjukkan hasil yang beragam. Wolfsfeld et al. (2015), dalam studinya terhadap masyarakat Israel selama kampanye pemilu 2013, menunjukkan bahwa pencarian informasi politik yang lebih kaya terkait erat dengan peningkatan pengetahuan politik serta partisipasi politik yang lebih tinggi. Maknanya, seseorang yang lebih banyak terpapar informasi politik, terutama melalui beragam sumber, cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Namun, temuan ini berbeda dengan hasil yang diperoleh Gustafsson (2012). Ia melakukan studi di negara Swedia. Gustafsson mendapati bahwasanya aktifnya seseorang di media sosial tidak membuat individu yang sebelumnya tidak aktif secara politik untuk mulai berpartisipasi. Menurutnya, meskipun media sosial dapat memfasilitasi interaksi politik bagi mereka yang sudah tertarik, hal ini tidak cukup untuk memotivasi orang yang apatis atau tidak terlibat secara politik untuk mulai berpartisipasi.

Dengan demikian, inkonsistensi muncul antara dua studi ini. Wolfsfeld et al. menyoroti peran media, termasuk media digital, dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama bagi individu yang aktif mencari informasi. Sebaliknya, Gustafsson berpendapat bahwa keaktifan di media sosial saja tidak mampu menarik minat politik bagi mereka yang sebelumnya tidak tertarik, sehingga tidak meningkatkan partisipasi politik di kalangan orang yang kurang aktif. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh konteks sosial dan politik yang berbeda, serta bentuk media yang dianalisis.

Penelitian Evita menunjukkan bahwasanya sumber utama informasi yang diperoleh oleh Gen Z sebagian besar adalah dari media sosial. Temuan ini mencerminkan peran penting teknologi digital yang tidak hanya berguna sebagai alat berkomunikasi, tapi juga sebagai saluran utama untuk mengakses berbagai informasi. Selain itu, studi ini juga mengungkapkan bahwa tujuan utama Gen Z dalam bermedia yaitu untuk mencari sebuah hiburan, yang menunjukkan betapa pentingnya aspek rekreasi dalam konsumsi media mereka.

Namun, meskipun hiburan menjadi prioritas utama, Gen Z juga aktif mencari informasi yang lebih serius atau non-hiburan. Salah satu jenis informasi yang paling dicari adalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan, yang menunjukkan adanya kesadaran dan kebutuhan mereka untuk memperoleh pengetahuan yang mendukung perkembangan karier dan pembentukan masa depan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Generasi Z lebih sering terpapar pada media sosial dan konten hiburan, mereka juga memiliki

kecenderungan untuk mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan praktis dan aspirasi hidup mereka.

Temuan ini penting dalam konteks memahami pola perilaku Generasi Z dalam mengakses informasi, yang dapat berdampak pada strategi komunikasi dan pendidikan yang lebih efektif. Dengan memahami preferensi media mereka, berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan dapat merancang pendekatan yang lebih tepat sasaran untuk menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi perkembangan generasi ini.

Penelitian mengenai keterlibatan politik Generasi Z menunjukkan hasil yang beragam dan tampak inkonsisten. Robin et al. menemukan bahwa Gen Z sebenarnya tertarik pada politik, akan tetapi merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup dan menginginkan pendidikan politik yang lebih baik untuk memahami isu-isu politik secara mendalam. Generasi ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam diskusi politik, asalkan mereka diberikan informasi yang memadai.

Namun, penelitian lain dari Plos One dalam majalah *Teen Vogue* menemukan sisi yang berbeda. Hampir 40 % dari Gen Z merasa stres akibat politik, dan sekitar 20 % mengalami dampak fisik, seperti kurangnya tidur, kelelahan, dan bahkan gejala-gejala depresi yang disebabkan oleh tekanan dari peristiwa politik. Selain itu, survei dari *American Psychological Association* menemukan bahwa Generasi Z (khususnya kelompok yang lebih tua) cenderung

lebih rentan terhadap dampak negatif politik secara emosional dan fisik dibandingkan generasi lain.

Inkonistensi ini muncul karena di satu sisi, Generasi Z tertarik dan ingin lebih banyak belajar tentang politik, tetapi di sisi lain, keterpaparan terhadap politik justru menyebabkan stres dan dampak kesehatan mental yang negatif. Ini mencerminkan adanya ketegangan antara keinginan untuk terlibat dalam politik dan dampak psikologis negatif yang dihasilkan dari intensitas informasi politik yang mereka terima.

Dalam penelitian Asmarantika dkk (2022) menemukan bahwa salah satu ciri khas dari Generasi Z dalam hal mengonsumsi informasi, termasuk informasi politik, adalah kecenderungan mereka untuk menerima informasi secara insidental atau tidak sengaja. Artinya, mereka tidak secara aktif mencari berita atau topik politik melalui media sosial.

Sebaliknya, informasi politik sering kali datang kepada mereka melalui media sosial yang menjadi platform utama mereka untuk bersosialisasi dan mencari hiburan. Algoritma media sosial yang menyesuaikan konten berdasarkan preferensi dan interaksi pengguna secara tidak langsung menyajikan informasi politik, bahkan saat mereka sebenarnya hanya berniat untuk melihat konten hiburan atau terhubung dengan teman.

Dengan kata lain, Generasi Z mendapatkan paparan informasi politik bukan karena mereka mencarinya, melainkan karena informasi tersebut muncul di tengah aktivitas online mereka. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X,

dan YouTube menjadi jembatan antara hiburan dan berita, mengaburkan batas antara keduanya. Sering kali, informasi politik yang mereka terima berbentuk konten yang menarik dan mudah dikonsumsi, seperti meme, video pendek, atau komentar dari influencer, yang bisa menyebar dengan cepat tanpa disengaja.

Gambar 1.4 Indeks Literasi Digital Dalam Konteks Politik



Sumber: (Japelidi, 2023)

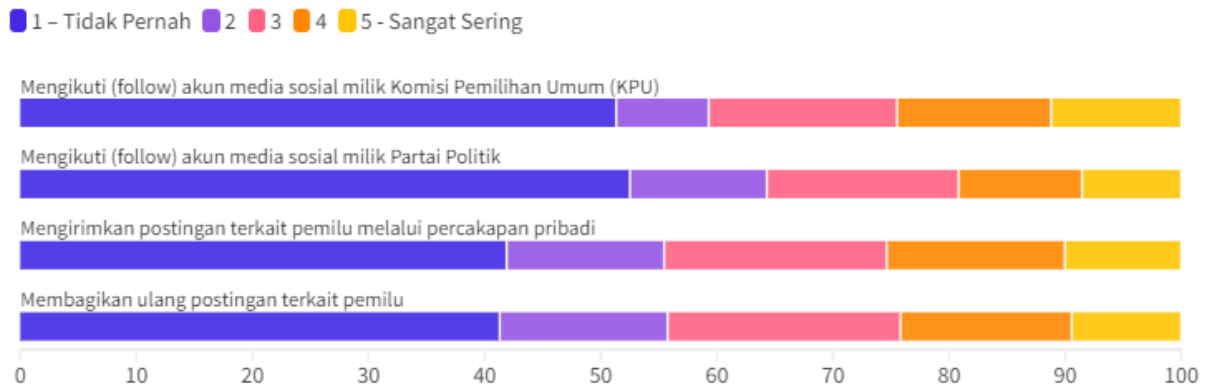
Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) pada tahun 2023 melakukan riset mendalam terkait indeks literasi digital dalam konteks politik pada generasi muda di enam daerah berbeda, yakni Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Manado, Padang, dan Yogyakarta. Riset ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana generasi muda di wilayah-wilayah tersebut memiliki kemampuan literasi digital, terutama dalam konteks Pemilu. Metodologi penelitian yang digunakan berlandaskan pada 10 kompetensi literasi digital Japelidi, dengan fokus khusus pada Pemilu sebagai ruang lingkup utama. Salah satu contoh pernyataan yang

menjadi tolok ukur literasi digital terkait Pemilu adalah: “Saya mampu mencari informasi terkait Pemilu di internet”. Pernyataan ini mencerminkan aspek penting dalam kemampuan akses informasi, terutama dalam era digital yang penuh dengan konten online.

Hasil riset mengungkapkan temuan yang menarik. Secara keseluruhan, responden yang merupakan generasi muda memiliki indeks literasi digital yang tergolong cukup baik, yaitu di atas 3.5. Jawa Timur menjadi wilayah dengan indeks literasi digital tertinggi, yaitu 3.9, sementara Yogyakarta menempati posisi terendah dengan indeks 3.5. Salah satu aspek literasi digital yang menonjol dalam penelitian ini adalah keterampilan akses, yang mencatat skor tertinggi dibandingkan dengan keterampilan literasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda tidak lagi mengalami hambatan dalam mengakses internet untuk mencari informasi terkait Pemilu, sebuah perkembangan positif dalam era informasi digital.

Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa indeks keterampilan partisipasi dan kolaborasi masih tergolong rendah. Generasi muda, meskipun mampu mengakses informasi, cenderung jarang terlibat aktif dalam diskusi publik atau forum-forum digital yang membahas Pemilu. Keterlibatan dalam ruang digital untuk berpartisipasi secara aktif, seperti mengomentari atau berdiskusi terkait isu-isu politik, masih terbatas. Hal ini menyoroti tantangan bagi penguatan partisipasi politik generasi muda di dunia maya, yang seharusnya dapat menjadi ruang penting dalam membentuk pandangan politik serta meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Gambar 1.5 Indeks Partisipasi Politik



Sumber: (Japelidi, 2023)

Selain itu, riset Japelidi 2023 juga mengukur berbagai bentuk partisipasi politik masyarakat dalam ruang digital. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung tidak pernah terlibat aktif dalam mengikuti akun media sosial resmi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Partai Politik (Parpol). Hal ini mencerminkan rendahnya minat publik dalam mengonsumsi informasi langsung dari lembaga-lembaga terkait pemilu di platform digital. Tak hanya itu, responden juga jarang membagikan ulang atau menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan pemilu, baik yang berasal dari sumber resmi maupun yang tersebar di media sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam diskusi politik digital masih terbilang rendah, yang dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pemilu.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik Generasi Z muncul dari

kompleksitas dan inkonsistensi yang terlihat dalam temuan-temuan yang ada. Di satu sisi, ada studi yang menunjukkan bahwa penggunaan media, terutama media digital, dapat mendorong partisipasi politik. Namun, di sisi lain, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan politik di media sosial tidak selalu memotivasi individu yang sebelumnya tidak tertarik, serta dapat menyebabkan stres yang berdampak negatif pada kesehatan mental.

Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dengan akses mudah terhadap teknologi dan media sosial menunjukkan dinamika yang menarik. Mereka sering kali terpapar informasi politik secara insidental, bukan karena aktif mencarinya. Ini menciptakan dualitas, di mana mereka bisa tertarik pada politik tetapi juga merasakan tekanan emosional akibat intensitas informasi yang mereka konsumsi.

Partisipasi politik yang rendah menjadi salah satu kekhawatiran bagi demokrasi Indonesia. Generasi muda, yang sering dianggap sebagai agen perubahan dan pemilik masa depan bangsa, justru menunjukkan penurunan minat terhadap politik dan pemilu. Fenomena ini terlihat dari berbagai survei yang mengungkapkan rendahnya tingkat keterlibatan generasi milenial dan Gen Z dalam kegiatan politik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DALAM PEMILU 2024 DI JAWA TENGAH”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Media Sosial Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z Dalam Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DALAM PEMILU 2024 DI JAWA TENGAH

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik dan ilmu politik, baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan untuk berbagai kalangan dalam memahami pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu, sehingga di masa depan partisipasi masyarakat dapat meningkat.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian terdahulu

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perspektif Gen Z tentang Politik: Minat Tinggi, Kurang Terinformasi, dan Mendesak Pendidikan Politik	Patricia Robin, Silvanus Alvin, Tesalonika Hasugian (2022)	Kualitatif	Penelitian kualitatif ini menggunakan metode diskusi kelompok terarah (focus group discussion) untuk memperoleh data yang mendalam. Terdapat tiga temuan menarik dalam penelitian ini: pertama, Generasi Z sangat tertarik pada politik, namun merasa kurang terinformasi. Kedua, mereka memandang partai politik secara negatif, terutama akibat tingginya kasus korupsi. Ketiga, Generasi Z menginginkan adanya pendidikan politik. Setiap

				temuan ini dijelaskan secara rinci dalam makalah penelitian ini.
2.	Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik	Nona Evita (2023)	Kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun politik bukanlah preferensi utama, Generasi Z tetap mengakses informasi seputar politik. Media sosial adalah platform utama untuk mencari informasi-informasi politik. Konsumsi informasi politik oleh Generasi Z bersifat insidental dengan rentang perhatian yang hanya sekitar 8 detik. Meskipun memiliki rentang perhatian yang cenderung singkat, Gen Z tetap menganggap sirius nilai-

				<p>nilai seperti keaslian, reputasi, dan kredibilitas.</p> <p>Temuan ini memberikan masukan agar penyelenggara dan peserta Pemilu dapat menyajikan informasi politik dengan cara yang ringan, edukatif, menghibur, dan memiliki visual yang menarik.</p>
3.	Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024	Suntra Yanti dkk (2024)	Deskriptif kualitatif	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, media sosial berperan sebagai platform yang memungkinkan masyarakat untuk menilai</p>

				<p>kelayakan seorang kandidat dalam Pemilu. Dengan demikian, pemilih dapat membuat prediksi terkait pilihan mereka menjelang kampanye. Ini merupakan salah satu manfaat positif media sosial, karena memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memperoleh informasi lebih banyak dan berpartisipasi aktif dalam proses politik.</p>
4.	<p>Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu</p>	<p>Maghrifa Kafka Razaqa dkk (2022)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian mengungkapkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan terhadap orientasi politik pemilih pemula. Kelompok ini cenderung menjadikan media sosial</p>

				<p>sebagai sumber utama informasi politik sekaligus ruang untuk berinteraksi dengan pandangan politik yang sejalan dengan keyakinan mereka. Lebih lanjut, persepsi pemilih pemula terhadap kandidat dan isu politik sangat dipengaruhi oleh media sosial. Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula bervariasi. Terdapat perbedaan dalam cara pemilih pemula menggunakan dan merespons informasi politik yang mereka</p>
--	--	--	--	--

				<p>terima dari media sosial.</p> <p>Faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi, pengalaman politik sebelumnya, dan kepribadian individu dapat memengaruhi sejauh mana media sosial memengaruhi keputusan politik mereka.</p>
5.	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial</p>	<p>Deti Fitriani dkk (2023)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penggunaan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah lanskap partisipasi politik. Hal ini membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan memperbesar peluang untuk diskusi publik yang lebih inklusif. Dengan bantuan media sosial dan teknologi, warga negara</p>

				<p>kini dapat menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik. Namun, berbagai penelitian juga mengidentifikasi sejumlah masalah dan dampak negatif yang timbul seiring dengan peran teknologi dan media sosial dalam partisipasi publik. Misinformasi, polarisasi politik, dan penyebaran ujaran kebencian merupakan isu-isu yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana interaksi antara teknologi, media sosial, dan</p>
--	--	--	--	---

				partisipasi masyarakat dapat membentuk dinamika demokrasi di Indonesia.
6.	Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat	Chairun Nisa Zempi, Ana Kuswanti, Siti Maryam (2023)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan dalam beberapa cara: terlibat atau terlibat dalam partisipasi politik; menghubungkan, memiliki jaringan dengan orang-orang yang terlibat dalam partisipasi politik; dan menggerakkan, memberikan dukungan pada jalannya partisipasi politik. Meskipun demikian, pendapat orang tentang penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik berbeda-beda. Terdapat

				enam stratifikasi politik masyarakat berdasarkan penggunaan media sosial sebagai sumber pengetahuan. Cara seseorang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi berbeda untuk setiap individu.
7.	Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada	Dimaz Oktama Andriyendi, Nurman S, Susi Fitria Dewi (2023)	Kuantitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,306, variabel media sosial berkontribusi sebesar 31% terhadap tingkat

				partisipasi politik pemilih pemula.
8.	Pengaruh Media Sosial Dalam Memprediksi Partisipasi Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024	Deki Pardana (2023)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan nilai konstanta (a) 38,228 dan nilai variabel media sosial (X) sebesar 0,125, konstanta 38,228 menunjukkan bahwa variabel partisipasi pemilih pemula sebesar 38,228. Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial dan partisipasi pemilih pemula, seperti yang ditunjukkan oleh signifikan media sosial (X1) sebesar 0,02 dan nilai t tabel. Variabel media sosial (X) juga berdampak positif dan signifikan terhadap

				<p>perilaku pemilih pemula, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi variabel media sosial (X) untuk setiap penambahan 1% nilai media sosial. Dengan demikian, nilai hitung t adalah 0,998. Jadi, media sosial memengaruhi partisipasi pemilih pemula.</p>
9.	Media Sosial Dan Partisipasi Politik Milenial Riau	Fitria Utami (2020)	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik milenial di Riau dipengaruhi oleh media sosial sebesar 0,205 (20,5%).</p>
10.	Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019:	Ahmad Nurcholis & Tri Rizki Putra (2020)	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula adalah yang paling berpengaruh dalam perebutan suara, khususnya melalui</p>

	Studi Pada Mahasiswa FISIPOL UGM			kampanye media sosial. Mereka juga aktif menggunakan media sosial dan menjadikannya sebagai sumber utama informasi. Mereka juga cenderung memilih pasangan yang aktif memberikan informasi melalui media sosial karena dianggap menarik dan mudah dihubungi.
11.	Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan	Muhammad Irfan Dwitama dll (2022)	Kualitatif	Menurut artikel ini, karena masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan mudah dan murah, media sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat.

12.	Persepsi tentang kampanye politik melalui media sosial dan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020	Diyah Mustika Anggraeni, Sunarso (2022)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (15.356 lebih besar dari 1.968855) dan F hitung lebih besar dari F tabel (234,812 lebih besar dari 3,89), dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari α (0,000 lebih kecil dari 0,05). Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada 2020 sebesar 46,9% dipengaruhi oleh persepsi kampanye politik melalui media sosial. Faktor lain memengaruhi bagian yang tersisa.
13.	Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap	Devianti Anggraini, Aang Wahyu Ariesta , A.G	Kuantitatif	Dalam penelitian ini, ditemukan hubungan yang kuat antara perilaku agresif dengan frekuensi,

	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden Ri 2019	Eka Wenats Wuryanta (2022)	dengan nilai skala 0,717; durasi, dengan nilai skala 0,573, menunjukkan hubungan yang kuat dengan perilaku agresif, dengan nilai skala 0,729. Dengan skala 0,802, hubungan antara penggunaan Instagram sebagai variabel dimensi dan pemilih baru sangat kuat. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi (r) = 0,802, yang sangat kuat, dan kontribusi R^2 dari regresi sebesar 64,4%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan Instagram sebagai media berkontribusi sebesar 64,4% terhadap
--	--	----------------------------	---

				partisipasi politik pemilihan baru di kalangan mahasiswa Komunikasi Program Studi Universitas Paramadina angkatan 2015 dan 2016.
14.	Peran Media Massa Tradisional Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa UPNVJ Pada Pemilihan Umum 2019	Drina Istyawati (2021)	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan televisi (-.129) dan surat kabar (-.187). Meskipun demikian, ada korelasi negatif antara penggunaan televisi dan partisipasi politik. Semakin sering mahasiswa menonton televisi yang berkaitan dengan informasi politik, semakin sedikit mereka berpartisipasi dalam

				<p>politik. Hasilnya membutuhkan studi tambahan. Selain itu, ditemukan bahwa mahasiswa tidak terlalu terlibat dalam politik.</p>
15.	<p>Studi Literatur : Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Gen Z (Zoomers)</p>	<p>Nazah Dwi Putricia dkk (2024)</p>	Kualitatif	<p>Media sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam membentuk partisipasi dan pengaruh Generasi Z dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekspresi diri dan pembentukan identitas hingga aktivisme sosial dan perilaku konsumen. Secara keseluruhan, media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap partisipasi politik Generasi Z, karena meskipun mereka dapat</p>

				meningkatkan akses informasi, kesadaran politik, dan mobilisasi politik, mereka juga dapat memperkuat polarisasi, menyebarkan informasi yang salah, dan menyebarkan informasi yang salah.
16.	Pengaruh Peran Kampanye Media Sosial terhadap Perilaku Pemilih Muda di Kota Semarang	Nureza Ade Saputra & Dewi Erowati (2024)	Kuantitatif	Hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel peran kampanye media sosial adalah positif (0,792) dan signifikan. Pengujian terhadap pengaruh kampanye media sosial terhadap perilaku pemilih muda menghasilkan nilai Fhitung sebesar 120,636, yang lebih besar dari Ftabel (2,96), dengan

				tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H ₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih muda.
17.	<i>Political information repertoires and political participation</i>	Gadi Wolfsfeld, Moran Yarchi and Tal Samuel-Azran (2016)	Kuantitatif	Artikel ini lebih lanjut berpendapat bahwa terdapat hubungan yang jelas antara informasi dan partisipasi masyarakat, dan menguji proposisi-proposisi ini dengan menggunakan sampel besar dan heterogen dari publik Israel selama kampanye pemilu 2013. Analisis mendukung klaim penelitian ini, meskipun terdapat

				beberapa pengecualian yang menarik.
18.	<i>The subtle nature of Facebook politics: Swedish social network site users and political participation</i>	Nils Gustafsson (2012)	Kualitatif	Diskusi menunjukkan bahwa meskipun praktik dan sikap bervariasi, penggunaan situs jejaring sosial saja tidak mendorong responden yang sebelumnya tidak aktif untuk berpartisipasi dalam politik. Responden yang merupakan anggota organisasi kepentingan melihat situs jejaring sosial sebagai alat yang berharga untuk partisipasi, sedangkan responden yang bukan anggota cenderung menghindari berbagi pandangan politik dengan teman-teman mereka. Mereka terpapar konten

				politik dan permintaan untuk berpartisipasi, tetapi umumnya lebih memilih untuk tetap pasif.
--	--	--	--	--

Sumber : Data Primer (Diolah Peneliti, 2024)

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan konteks yang lebih spesifik, serta pendekatan yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z dalam konteks Pemilu 2024 di Jawa Tengah, yang mengarah pada analisis lebih mendalam mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku politik generasi Z di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan dinamika lokal dan karakteristik sosial budaya setempat. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih umum, penelitian ini akan mengkhususkan pada generasi Z sebagai kelompok yang lebih mudah terpapar informasi melalui media sosial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stres akibat konsumsi informasi politik, dan ketidaktertarikan politik yang muncul akibat intensitas konten politik di media sosial. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemilu 2024 sebagai momen politik besar dapat memotivasi atau justru menghambat partisipasi politik generasi Z di Jawa Tengah. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab kekosongan yang ada dalam penelitian sebelumnya terkait dengan perilaku politik generasi Z di level daerah dan peran media sosial secara spesifik dalam meningkatkan atau menurunkan partisipasi mereka dalam Pemilu 2024.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau lembaga bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Menurut Keban (2008:6), administrasi publik bertujuan untuk melembagakan praktik manajemen yang selaras dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, serta peningkatan pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Lebih lanjut, administrasi publik dipahami sebagai perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayaninya, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dengan demikian, administrasi publik bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang interaksi antara negara atau lembaga negara dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan dalam memenuhi kebutuhan publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Chandler dan Plano dalam Keban (2008), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kemudian, Chandler dan Plano mendeskripsikan administrasi publik sebagai perpaduan seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan berbagai tanggung jawab.

Senada dengan itu, Dwight Waldo dalam Pasolong (2008:8) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup aspek manajemen, organisasi, individu, serta peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif.

Selain itu, administrasi publik telah berkembang dengan sangat cepat. Ilmu administrasi publik mengembangkan beberapa paradigma, salah satunya adalah administrasi publik sebagai proses politik. Meskipun ada pemahaman yang berbeda tentang administrasi dan politik, administrasi dan politik memang sulit dipisahkan.

Paradigma administrasi publik mengacu pada pendekatan, teori, dan konsep yang digunakan untuk memahami dan mengelola proses pemerintahan, kebijakan publik, dan organisasi sektor publik. Paradigma ini berkembang seiring waktu, mencerminkan perubahan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Berikut penjelasan beberapa paradigma utama dalam administrasi publik:

1. Paradigma Tradisional (Administrasi Klasik)

a) **Karakteristik Utama:**

- 1) Berbasis pada teori organisasi birokrasi Max Weber.
- 2) Menekankan hierarki, aturan formal, dan efisiensi.
- 3) Pemisahan antara politik (penentuan kebijakan) dan administrasi (pelaksanaan kebijakan).

4) Fokus pada tata kelola yang stabil dan prosedural.

b) **Kelemahan:**

- 1) Kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan.
- 2) Terlalu terpusat pada prosedur dan struktur, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat.

2. Paradigma Administrasi Publik Baru (*New Public Administration*)

a) **Muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an** sebagai respons terhadap kritik terhadap paradigma tradisional.

b) **Karakteristik Utama:**

- 1) Menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, responsivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Administrasi dipandang harus lebih humanis dan inklusif, memperhatikan kelompok rentan.
- 3) Fokus pada penyelesaian masalah masyarakat melalui inovasi.

c) **Kelemahan:**

- 1) Kadang kurang terstruktur dalam implementasinya karena menekankan fleksibilitas.

3. Paradigma Manajemen Publik Baru (*New Public Management - NPM*)

a) **Muncul pada 1980-an** sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap birokrasi tradisional.

b) **Karakteristik Utama:**

1) Menekankan efisiensi, efektivitas, dan penggunaan pendekatan manajerial sektor swasta dalam sektor publik.

2) Fokus pada hasil (*outcomes*) daripada proses.

3) Privatisasi, kontrak, dan kompetisi dianggap sebagai cara meningkatkan layanan publik.

4) Warga negara dipandang sebagai "pelanggan" yang harus dilayani dengan baik.

c) **Kritik:**

1) Cenderung mengabaikan nilai-nilai publik seperti keadilan dan inklusi sosial.

2) Berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses layanan bagi kelompok miskin atau marginal.

4. *Governance* (Tata Kelola)

a) **Muncul pada 1990-an** seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

b) **Karakteristik Utama:**

- 1) Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan publik.
- 2) Pemerintah tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi sebagai fasilitator dan regulator.
- 3) Fokus pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- 4) Muncul konsep seperti *network governance*, *good governance*, dan *collaborative governance*.

c) **Kritik:**

- 1) Bisa memunculkan konflik kepentingan jika tidak ada pengawasan yang memadai.
- 2) Tidak semua pihak mampu berpartisipasi secara setara.

5. *New Public Service* (NPS)

a) **Dikembangkan oleh Denhardt & Denhardt (2000)** sebagai kritik terhadap pendekatan New Public Management.

b) **Karakteristik Utama:**

- 1) Menempatkan warga negara sebagai mitra, bukan sekadar pelanggan.
- 2) Fokus pada nilai-nilai demokrasi, kolaborasi, dan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

3) Mengedepankan akuntabilitas publik dan etika pelayanan.

c) **Prinsip Utama:**

1) "Serving, not steering" (melayani, bukan sekadar mengarahkan).

2) Administrasi publik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya efisiensi manajerial.

6. *Digital Governance* dan Paradigma Teknologi

a) **Muncul pada abad ke-21** dengan perkembangan teknologi informasi.

b) **Karakteristik Utama:**

1) Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik (*e-governance*).

2) Fokus pada inovasi, transparansi, dan aksesibilitas layanan melalui platform digital.

3) Data-driven decision making dan analisis big data.

c) **Kritik:**

1) Tantangan keamanan data dan privasi.

2) Kesenjangan digital yang masih tinggi di banyak wilayah.

1.5.2.1 Administrasi Publik Sebagai Proses Politik

Menurut McCurdy, administrasi publik dapat dipahami sebagai sebuah proses politik, yaitu salah satu cara untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat dianggap sebagai metode utama dalam melaksanakan berbagai fungsi negara (Keban, 2008).

Administrasi dan politik merupakan dua elemen yang memiliki keterkaitan erat. Menurut John Rehfuss, sebagaimana dikutip oleh Irfan (2009:9), politik dapat didefinisikan sebagai perjuangan dalam mendistribusikan nilai-nilai dan sumber daya sosial (politics, the struggle over the allocation of social values and resources is intimately intertwined with administrative action). Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan administrasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik.

Dalam konteks ini, fungsi utama badan pemerintahan mencakup dua aspek utama, yaitu pelaksanaan kebijakan negara serta perumusan kebijakan. Peran ganda ini mencerminkan betapa pentingnya administrasi publik dalam proses politik, khususnya di Indonesia. Administrasi negara tidak hanya bertindak sebagai alat teknis (peran instrumental), tetapi juga memiliki kontribusi aktif dalam ranah politik, baik dalam tahap perumusan maupun implementasi kebijakan.

Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara memerlukan keterlibatan yang intens dalam dinamika politik, termasuk interaksi dengan berbagai aktor politik dan masyarakat. Selain itu, partisipasi politik dari masyarakat menjadi elemen kunci dalam memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan publik. Di sinilah peran administrasi publik menjadi krusial sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola aspirasi serta memfasilitasi proses partisipasi politik.

Pada situasi ini, publik juga memiliki kepentingan tersendiri dalam proses politik. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan sebagai pengawas dan pemberi masukan dalam formulasi kebijakan. Dengan demikian, administrasi publik berfungsi sebagai penggerak proses politik yang inklusif, memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam keputusan politik yang diambil oleh pemerintah.

Dalam kesimpulannya, peran administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari politik. Kolaborasi yang harmonis antara administrasi dan politik merupakan kunci keberhasilan dalam membangun kebijakan negara yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut sinergi yang baik antara pemerintah, administrator, dan masyarakat dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

1.5.3 Partisipasi

Partisipasi merupakan konsep yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Menurut Febriansyah (2015), istilah bahasa Inggris *participation* diambil dari kata "partisipasi," yang merujuk pada keterlibatan individu dalam sebuah kegiatan untuk membangkitkan rasa memiliki dan mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

Bornby, sebagaimana dikutip dalam Mardikanto (2015:81), mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan "mengambil bagian" dalam suatu kegiatan, dengan tujuan utama memperoleh manfaat dari keterlibatan tersebut. Namun, Mardikanto juga mencatat pandangan Beal yang menyoroti bahwa partisipasi, khususnya yang muncul akibat pengaruh atau rangsangan eksternal, merupakan indikator adanya proses perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Dalam perspektif Rahardjo (dalam Mardjino, 2008:19), partisipasi berarti keterlibatan dalam kegiatan bersama masyarakat, baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata. Rahardjo menekankan bahwa partisipasi mencakup lebih dari sekadar keterlibatan mental; masyarakat harus terlibat dalam semua aspek program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Isbandi (2007) mendefinisikan partisipasi masyarakat secara lebih menyeluruh sebagai keterlibatan dalam proses penyelesaian masalah. Proses ini mencakup pemanfaatan potensi lokal, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya berorientasi pada tindakan, tetapi juga pada proses deliberatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi, dengan kontribusi langsung dari pihak yang berpartisipasi.

Najib (dalam Huarerah, 2011:113-114) memperjelas konsep ini dengan membagi partisipasi menjadi dua kategori:

1. **Partisipasi sebagai alat** – Partisipasi digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendorong transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
2. **Partisipasi sebagai tujuan** – Dalam kategori ini, partisipasi memberikan peluang kepada warga untuk terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, partisipasi tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan administratif atau pembangunan, tetapi juga sebagai hak fundamental masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat, sekaligus mendorong keberlanjutan dan keberhasilan program-program pembangunan.

1.5.3.1 Bentuk-bentuk Partisipasi

Dusseldorp dalam Mardikanto (2015) menjelaskan berbagai jenis partisipasi masyarakat:

1. Berpartisipasi dalam kelompok masyarakat
2. Berpartisipasi dalam berdiskusi kelompok
3. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang membantu orang lain berpartisipasi dalam masyarakat
4. Memobilisasi sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan masyarakat

1.5.3.2 Tingkatan Partisipasi

Wilcox (2011) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dipahami dalam lima tahapan yang menggambarkan tingkat keterlibatan yang semakin mendalam. Berikut adalah lima tahapan tersebut:

1. **Memberikan Informasi**

Tahapan pertama dalam partisipasi masyarakat adalah pemberian informasi. Pada tahap ini, masyarakat hanya menerima informasi dari pihak yang berwenang atau pengelola program. Partisipasi di sini bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada masyarakat, tanpa adanya interaksi atau umpan balik dari masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pengetahuan dasar mengenai suatu isu atau kebijakan yang akan diterapkan.

2. **Konsultasi**

Pada tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, masukan, atau umpan balik terkait kebijakan atau program yang sedang direncanakan atau dilaksanakan. Masyarakat tidak hanya mendengar, tetapi juga dapat mengemukakan pandangan mereka melalui berbagai forum konsultasi. Meskipun partisipasi masih bersifat konsultatif, umpan balik yang diberikan oleh masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil.

3. **Pengambilan Keputusan Bersama**

Dalam tahap ini, masyarakat tidak hanya memberi pendapat tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan. Di sini, terjadi dialog yang lebih intens antara pengambil kebijakan dan masyarakat untuk mencari kesepakatan bersama. Masyarakat memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan atau program yang akan dijalankan, dan memberikan dukungan terhadap ide-ide yang dianggap tepat dan bermanfaat.

4. Bertindak Bersama

Pada tahap ini, masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang telah direncanakan. Ini adalah bentuk partisipasi yang lebih aktif, di mana masyarakat tidak hanya memberikan masukan atau mendukung kebijakan, tetapi juga turut serta dalam aksi nyata. Kemitraan antara pemerintah atau pihak berwenang dengan masyarakat menjadi kunci, karena keduanya bekerja sama untuk melaksanakan rencana yang telah disepakati.

5. Memberikan Dukungan untuk Mengembangkan Agenda Kegiatan

Tahapan terakhir adalah memberikan dukungan untuk pengembangan agenda kegiatan lebih lanjut. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan, tetapi juga berperan aktif dalam merencanakan dan mengembangkan agenda kegiatan di masa depan. Mereka memberikan dukungan dan kontribusi untuk

memperbaiki atau mengembangkan kebijakan dan program agar lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, kelima tahapan tersebut menggambarkan progresi dari keterlibatan yang lebih sederhana (memberikan informasi) menuju tingkat keterlibatan yang lebih kompleks dan kolaboratif (memberikan dukungan untuk pengembangan agenda kegiatan). Proses ini mencerminkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam setiap aspek kebijakan dan pembangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program.

Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan suatu program atau kebijakan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, sebuah kebijakan atau program mungkin tidak akan mencapai tujuannya secara maksimal. Bergantung pada kekuatan dan keterlibatan masyarakat, mereka dapat berperan aktif dalam membentuk, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program yang ada. Dalam konteks ini, Febriansyah (2015) mengidentifikasi tiga cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam kebijakan dan program, yaitu:

1. Minat Masyarakat

Minat masyarakat merujuk pada tingkat ketertarikan atau perhatian yang dimiliki oleh masyarakat terhadap suatu

kebijakan atau program. Minat ini berpengaruh besar dalam mencapai tujuan pekerjaan atau jabatan yang telah ditentukan. Masyarakat yang memiliki minat yang tinggi terhadap suatu program cenderung lebih terlibat dalam prosesnya, baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Minat ini menjadi pendorong yang kuat untuk mendukung kesuksesan suatu kebijakan.

2. Keaktifan Masyarakat

Keaktifan masyarakat berarti adanya keterlibatan yang dinamis, giat, gigih, dan penuh energi dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Masyarakat yang aktif memiliki kecenderungan untuk terlibat secara berkelanjutan, menyebarkan informasi, dan memperluas partisipasi di kalangan kelompok lain. Keaktifan ini bukan hanya terbatas pada tahap-tahap tertentu, tetapi melibatkan komitmen yang konsisten terhadap keberhasilan kebijakan atau program, serta upaya untuk memperluas dampaknya di tingkat masyarakat yang lebih luas.

3. Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat merujuk pada bentuk keterlibatan masyarakat yang lebih konkret dan langsung dalam suatu program atau kebijakan. Ini bisa berupa partisipasi dalam program kesehatan, memberikan bantuan

atau dukungan kepada lembaga atau instansi yang bertugas untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi ini bisa bersifat materiil maupun non-materiil, seperti menyumbangkan tenaga, waktu, pemikiran, atau sumber daya lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap program yang ada sangat penting untuk memperkuat dampak positif dan keberlanjutan kebijakan tersebut.

Dengan memahami ketiga aspek partisipasi ini, kita dapat melihat bagaimana keterlibatan masyarakat yang mendalam, baik dalam bentuk minat, keaktifan, maupun kontribusi langsung dapat memperkuat efektivitas dan keberlanjutan dari program dan kebijakan yang diterapkan. Partisipasi yang luas dan mendalam menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut, sehingga meningkatkan keberhasilan dan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

1.5.3.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan publik, termasuk dalam pemilihan pemimpin negara. Bentuk partisipasi ini bisa langsung maupun tidak langsung, seperti memilih dalam pemilu, menghadiri rapat umum, atau bergabung dalam partai politik atau gerakan sosial.

Menurut Budiarjo (2008), partisipasi politik mencakup berbagai tindakan seperti:

1. **Menghadiri Rapat Umum** untuk menyampaikan aspirasi.
2. **Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum** sebagai bentuk keterlibatan langsung.
3. **Melakukan Lobi atau Kontak dengan Pejabat Pemerintah** untuk mempengaruhi kebijakan.
4. **Menjadi Anggota Partai atau Gerakan Sosial** untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik.

Keterlibatan aktif dalam politik ini penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Kesadaran politik yang kuat dan inisiatif yang dilakukan secara mandiri tanpa tekanan dari orang lain memungkinkan partisipasi politik. Salah satu contoh partisipasi adalah memberikan suara. Dalam buku Saiful Mujani, Verba, Nie, dan Kim menjelaskan bahwa kandidat yang berpartisipasi dalam pemilu dan ingin menduduki posisi strategis menerima tingkat voting yang tinggi. Voting adalah salah satu bentuk partisipasi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya karena memiliki dampak besar bagi politik dan memiliki hasil kolektif.

1.5.3.4 Faktor-Faktor Partisipasi

Menurut Yulianti (2012), terdapat beberapa komponen penting dalam partisipasi yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk terus terlibat dalam proses partisipasi. Komponen-komponen tersebut meliputi:

a. Pengetahuan dan Keahlian Dasar

Pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi partisipasi mereka. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun program-program tertentu.

b. Pekerjaan Masyarakat

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi mereka. Bagi sebagian orang, pekerjaan yang mereka jalani mungkin membatasi waktu atau energi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sedangkan bagi yang lain, pekerjaan tersebut justru bisa mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai program.

c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf

Tingkat pendidikan yang dimiliki serta tingkat buta huruf dalam masyarakat memengaruhi seberapa besar keinginan dan

kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau mengalami kesulitan membaca dan menulis mungkin merasa kesulitan dalam memahami atau melaksanakan jenis partisipasi yang ditawarkan.

d. Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi. Di beberapa budaya, peran gender tertentu mungkin membatasi kesempatan seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan atau program tertentu, baik karena norma sosial maupun pembagian peran tradisional dalam masyarakat.

e. Kepercayaan terhadap Budaya Tertentu

Kepercayaan yang dianut oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan agama dan budaya, memainkan peran penting dalam menentukan sikap dan kesiapan mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat dengan keberagaman budaya dan agama yang tinggi mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara dan bentuk partisipasi yang dapat diterima.

Dengan memahami komponen-komponen ini, kita bisa lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program sosial, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

1.5.3.5 Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Myron Weiner (dalam Ridestian, 2020) menyebutkan, setidaknya lima faktor di bawah ini akan memengaruhi tingkat partisipasi politik:

1. Modernisasi terjadi di seluruh dunia. Industrialisasi, komersialisasi pertanian, peningkatan urbanisasi, melek huruf yang luas, reformasi pendidikan dan teknologi media massa. Ketika komunitas di kota-kota baru, termasuk buruh, pedagang, dan pekerja lainnya, mulai menyadari bahwa keberadaannya dapat memengaruhi nasib mereka sendiri. Mereka akan berkontribusi pada kekuasaan politik.
2. Struktur kelas sosial berubah. Kemunculan kelas pekerja kelas menengah yang baru muncul tersebar luas dan sedang berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi. Beri orang-orang peluang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan politik, yang mengubah cara partisipasi politik mereka.
3. Pengaruh Komunikasi Massa Modern dan Intelektual Intelektual sering menyuarakan ide-ide mereka kepada masyarakat umum untuk mendorong massa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Gagasan-gagasan baru semakin cepat tersebar melalui teknologi modern komunikasi dan transportasi.
4. Konflik antara Kelompok Pemimpin Politik. Karena perselisihan dan persaingan politik muncul di wilayah elit, mereka dapat mencari dukungan massa sebanyak mungkin.

Gerakan persamaan hak akhirnya muncul dari tindakan mencari dukungan seperti ini. Konflik mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik.

5. Keterlibatan luas pemerintah dalam masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam kebanyakan kasus, penyebaran kegiatan pemerintah ke bidang kebijakan baru mengakibatkan keterlibatan pemerintah dalam semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika tidak ada hak yang sah untuk berpartisipasi dalam politik, orang tidak dapat menentang pemerintah, meskipun terkadang tindakan pemerintah merugikan mereka. Oleh karena itu, permintaan yang terorganisir akan kesempatan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan politik biasanya muncul sebagai akibat dari perluasan kegiatan pemerintah.

1.5.3.6 Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingkat keterlibatan dan kegiatannya. **Partisipasi politik aktif** melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Kegiatan ini mencakup memberikan masukan terhadap kebijakan publik, menyarankan alternatif kebijakan, serta memberikan kritik dan usulan perbaikan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, **partisipasi politik pasif**

lebih terbatas pada peran sebagai penerima dampak kebijakan, tanpa terlibat secara langsung dalam proses pembuatannya.

Selain pembagian tersebut, Milbrath dan Goel membagi partisipasi politik menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keterlibatannya:

1. **Apatis**, Kelompok ini adalah orang-orang yang tidak terlibat sama sekali dalam proses politik. Mereka cenderung menarik diri dan tidak memberikan perhatian atau kontribusi terhadap kegiatan politik, sering kali karena merasa tidak berdaya atau tidak tertarik dengan isu politik.
2. **Spektor**, Individu dalam kategori ini adalah mereka yang, meskipun tidak aktif terlibat dalam kegiatan politik sehari-hari, setidaknya pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum atau kegiatan politik lainnya. Mereka berfungsi sebagai penonton, yang mengambil bagian dalam beberapa momen penting, namun tidak terlalu aktif dalam proses yang lebih luas.
3. **Gladiator**, Kelompok ini mencakup mereka yang sangat aktif dalam dunia politik. Gladiator tidak hanya mengikuti perkembangan politik, tetapi juga secara langsung berpartisipasi dalam kampanye, organisasi politik, atau aktivitas yang mempengaruhi kebijakan. Mereka adalah

pendorong utama dalam perubahan politik dan sering kali berada di garis depan dalam aksi-aksi politik.

4. **Pengkritik**, Pengkritik adalah individu yang secara aktif terlibat dalam memberikan opini dan kritik terhadap kebijakan yang ada. Mereka tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, serta mempengaruhi kebijakan dengan cara memberikan pandangan yang konstruktif untuk perbaikan.

Menurut Gabriel Almond, yang dikutip dalam Mohtar Mas'ood (1991), ada dua kategori utama partisipasi politik: konvensional dan non-konvensional. Pembagian ini bergantung pada bagaimana masyarakat terlibat dalam proses politik dan seberapa besar keterlibatan ini diterima dalam sistem politik yang berlaku.

1) Partisipasi Politik Konvensional

Partisipasi politik konvensional merujuk pada bentuk-bentuk keterlibatan dalam proses politik yang dianggap normal, legal, dan diterima dalam sistem demokrasi modern. Bentuk-bentuk partisipasi konvensional ini umumnya sudah terinstitusionalisasi dan memiliki saluran yang jelas untuk menyalurkan aspirasi politik. Beberapa contoh partisipasi politik konvensional antara lain:

- a) **Pemberian suara (voting):** Merupakan bentuk partisipasi paling dasar dalam demokrasi, di mana warga negara menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin atau kebijakan.
- b) **Ikut dalam diskusi politik:** Melibatkan diri dalam perdebatan publik, baik secara langsung maupun melalui media, mengenai isu-isu politik.
- c) **Ikut kegiatan kampanye:** Mendukung calon atau partai politik tertentu dengan cara berkampanye, seperti membagikan leaflet atau menghadiri rapat umum.
- d) **Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan:** Bergabung dengan organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan politik tertentu untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

2) Partisipasi Politik Non-Konvensional

Partisipasi politik non-konvensional, di sisi lain, merujuk pada bentuk-bentuk keterlibatan dalam proses politik yang tidak konvensional, seringkali di luar saluran-saluran yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk partisipasi ini seringkali bersifat spontan, tidak terorganisir, dan bahkan dapat melanggar hukum. Beberapa contoh partisipasi politik non-konvensional antara lain:

- a) **Pengajuan petisi:** Mengumpulkan tanda tangan untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah atau lembaga terkait.
- b) **Demonstrasi:** Mengadakan aksi unjuk rasa di tempat umum untuk menyampaikan aspirasi atau protes.
- c) **Konfrontasi:** Menghadapi pihak berwenang atau kelompok lawan secara langsung untuk menyampaikan tuntutan.
- d) **Mogok:** Menolak bekerja untuk menekan pihak tertentu agar memenuhi tuntutan.
- e) **Tindakan kekerasan terhadap harta benda:** Merusak fasilitas umum atau milik pribadi sebagai bentuk protes.

1.5.4 Media Sosial

Istilah **media sosial** berasal dari dua kata dasar, yaitu "media" dan "sosial." **Media** merujuk pada alat atau saluran untuk berkomunikasi, sedangkan **sosial** mengacu pada kenyataan sosial, yang menggambarkan bahwa setiap individu berpartisipasi dalam aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, baik media maupun sosial dianggap sebagai produk dari interaksi sosial, seperti yang diungkapkan oleh Durkheim dalam Mulawarman (2017).

Media sosial dapat dipahami sebagai alat atau platform yang memungkinkan komunikasi, sosialisasi, dan interaksi antar individu melalui media yang dirancang untuk mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan bahwa media sosial, sebagai bentuk media daring (online), memberikan ruang bagi penggunanya untuk berpartisipasi dan berbagi informasi melalui berbagai platform, seperti jejaring sosial, blog, dan forum. Di antara jenis-jenis media sosial tersebut, jejaring sosial merupakan yang paling umum digunakan.

Selain itu, media sosial menyediakan cara baru untuk berkomunikasi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, menggunakan perangkat yang kita miliki. Inilah yang membuat media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum munculnya media sosial, orang lebih sering berkomunikasi melalui SMS atau telepon, namun kini kebanyakan orang lebih memilih menggunakan layanan pesan instan atau obrolan melalui berbagai aplikasi media sosial. Media sosial juga menawarkan akses informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan media konvensional, seperti surat kabar atau televisi, sehingga lebih banyak orang yang memilih menggunakan media sosial karena lebih efisien dalam hal waktu.

1.5.4.1 Jenis-jenis Media Sosial

Menurut Putri, Wilga S. R. et al. (2016), media sosial dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Beberapa jenis media sosial yang dimaksud antara lain:

a. **Blog dan Mikroblog**, seperti Twitter, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran atau informasi dalam bentuk teks

singkat.

b. **Situs Jejaring Sosial Berita**, seperti Digg, yang berfungsi sebagai platform untuk berbagi dan mendiskusikan berita atau artikel yang menarik.

c. **Situs Jejaring Sosial**, seperti Facebook, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi foto, video, dan status dengan teman-teman mereka.

d. **Dunia Sosial Virtual**, seperti *Second Life*, yang menawarkan pengalaman interaksi dalam dunia maya dengan karakter yang dapat dikendalikan oleh pengguna.

e. **Konten Kolaborasi**, seperti Wikipedia, yang merupakan platform di mana pengguna dapat bersama-sama membuat, mengedit, dan membagikan konten berbasis pengetahuan.

f. **Konten Video**, seperti YouTube, yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video dalam berbagai genre dan topik.

g. **Game Dunia Maya**, seperti *World of WarCraft*, yang menyediakan ruang bagi para pemain untuk berinteraksi dalam lingkungan game online yang luas dan kompleks.

Masing-masing jenis media sosial ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dan berbagi informasi antar pengguna.

Adapun Media sosial yang populer di Indonesia meliputi Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, dan Kaskus. Facebook, dibuat oleh Mark Zuckerberg pada 2004, memungkinkan pengguna untuk berjejaring setelah mendaftar dengan email. YouTube, didirikan pada 2005, memungkinkan berbagi video. Instagram, aplikasi berbagi foto dan video yang diluncurkan pada 2010, diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Twitter, dengan batas 140 karakter, digunakan untuk komunikasi politik dan darurat. WhatsApp memfasilitasi pengiriman pesan dan media. Line, diluncurkan pada 2011, menyediakan berbagai fitur pesan lintas platform. Kaskus, forum terbesar Indonesia, didirikan pada 1999.

1.5.4.2 Karakteristik Media Sosial

Media sosial dapat didefinisikan sebagai platform teknologi digital yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi, komunikasi, serta interaksi yang melibatkan konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*). Tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi secara cepat, media sosial juga menyediakan platform bagi individu untuk mengekspresikan diri dan membentuk identitas pribadi, baik secara langsung melalui interaksi waktu nyata maupun secara tertunda dengan postingan yang disebarkan kepada audiens yang luas. Selain itu, media sosial memiliki sejumlah karakteristik penting yang membedakannya dari bentuk media lainnya, seperti kemudahan akses, interaktivitas, kemampuan untuk menjangkau

khalayak global, dan sifat dinamis yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai alat promosi, edukasi, dan bahkan transformasi sosial di berbagai aspek kehidupan. Menurut Mulyati (2014) karakteristik media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Konten, yang berarti konten yang dibagikan kepada khalayak seluas-luasnya tanpa batasan;
- b. Konteks, yang berarti bahwa informasi muncul tanpa pintu gerbang dan tidak ada yang menghambatnya; dan Konteks yang berarti bahwa semua posting-an dikirim dari satu jalur tanpa adanya orang lain yang menjadi perantara.
- c. Isi pesan dikirim secara langsung melalui jaringan, dan
- d. Konten dapat diterima dengan cepat melalui jaringan dan dapat tertunda tergantung pada waktu interaksi khalayak.
- e. Pengguna media sosial digunakan untuk mengaktualisasi diri.

1.5.4.3 Indikator Media Sosial

Mayfield, dalam Hamzah (2015:15), mengemukakan lima indikator utama dari media sosial yang menjadikannya platform yang sangat efektif untuk interaksi sosial dan komunikasi. Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Partisipasi:** Media sosial mendorong pengguna untuk berkontribusi aktif, baik melalui unggahan pribadi, komentar, maupun berbagi konten. Pengguna tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaku yang dapat memberikan umpan balik kepada orang lain.

b. **Keterbukaan:** Sebagian besar layanan media sosial bersifat terbuka, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik. Ini memberi kebebasan kepada pengguna untuk membuat keputusan sendiri, berbagi pandangan, serta menyebarkan informasi secara bebas.

c. **Percakapan:** Media sosial memfasilitasi komunikasi dua arah antara pengguna, yang dapat saling berbicara, berdiskusi, dan berbagi pesan. Percakapan ini bisa bersifat pribadi atau terbuka, serta dapat dijangkau oleh khalayak lebih luas.

d. **Komunitas:** Media sosial memudahkan pembentukan komunitas atau kelompok dengan minat yang sama. Platform ini mendukung komunikasi yang lebih efektif di antara anggota komunitas, yang dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan dukungan.

e. **Saling Terhubung:** Salah satu kekuatan utama media sosial adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Interaksi yang terjadi di media sosial memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain yang sebelumnya tidak

terjangkau, membuka peluang untuk berbagi informasi, sumber daya, dan jaringan.

Kelima indikator ini menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat dinamis untuk komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antar individu dan kelompok.

1.5.5 Pemilihan Umum

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 1, pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam Konstitusi dan berdasarkan Pancasila, yang mencakup pelaksanaan yang **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing prinsip tersebut:

a. Langsung

Prinsip langsung berarti rakyat, sebagai pemilih, berhak memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa melalui perantara. Hal ini memastikan bahwa suara yang diberikan benar-benar mencerminkan pilihan individu tanpa adanya campur tangan pihak lain.

b. Umum

Prinsip umum mengacu pada kenyataan bahwa pemilu terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, jenis kelamin, daerah asal, pekerjaan, atau status sosial lainnya. Semua warga negara yang memenuhi kriteria diizinkan untuk memilih.

c. **Bebas**

Bebas berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa ada tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak manapun. Pemilih diberikan kebebasan untuk memilih calon yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingannya.

d. **Rahasia**

Prinsip rahasia menjamin bahwa pemilih dapat memberikan suara tanpa diketahui oleh orang lain. Proses pemungutan suara dijamin kerahasiaannya, sehingga pilihan pemilih hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan tidak ada pihak lain yang dapat mengaksesnya.

e. **Jujur**

Prinsip jujur mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu untuk bertindak dengan integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua proses pemilu harus dilaksanakan dengan transparansi dan kejujuran untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.

f. **Adil**

Prinsip adil menegaskan bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu harus diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Proses pemilu harus bebas dari kecurangan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik pemilih maupun peserta pemilu, mendapatkan kesempatan yang sama dalam kompetisi.

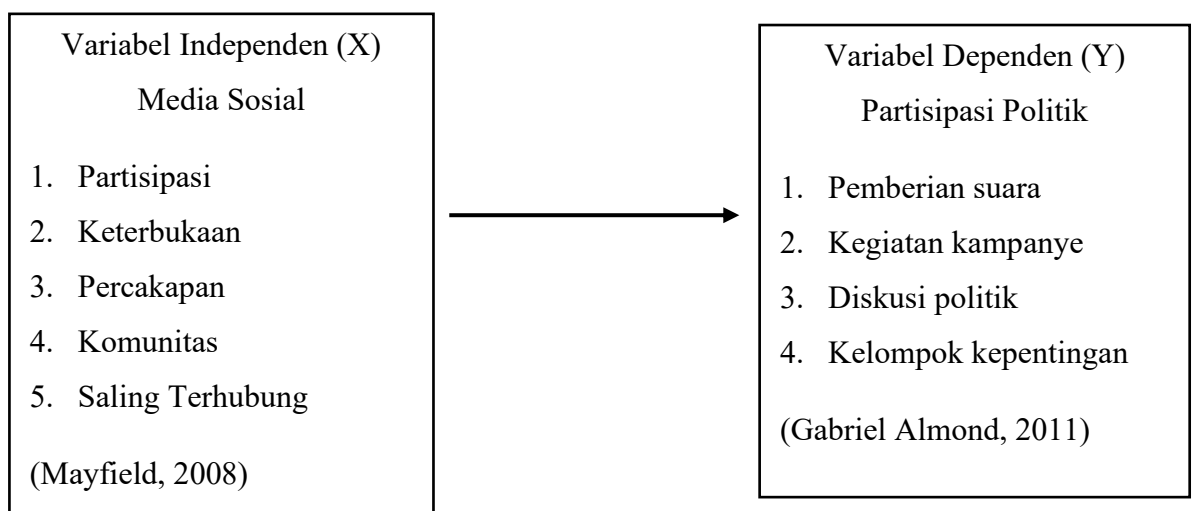
Keseluruhan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan cara yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh seluruh masyarakat.

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan sejumlah uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti menyusun kerangka pikir penelitian ini yang mencakup dua variabel utama, yaitu variabel X yang berperan sebagai variabel independen, dan variabel Y sebagai variabel dependen. Variabel X dalam penelitian ini merujuk pada *Penggunaan Media Sosial*, yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu *Partisipasi Politik*. Dalam hal ini, *Penggunaan Media Sosial* sebagai variabel X mencakup beberapa dimensi penting seperti Partisipasi, Keterbukaan, Percakapan, Pembentukan Komunitas, dan Keterhubungan antar pengguna. Setiap dimensi tersebut menggambarkan cara-cara di mana media sosial dapat membentuk interaksi publik yang pada akhirnya memengaruhi perilaku politik seseorang.

Sementara itu, variabel Y, yaitu Partisipasi Politik, terdiri dari berbagai bentuk aktivitas politik yang ditunjukkan oleh masyarakat, antara lain Pemberian Suara (voting), Kegiatan Kampanye, Diskusi Politik, serta Keterlibatan dalam Kelompok Kepentingan. Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan bagaimana masyarakat berperan dalam proses politik, baik melalui tindakan langsung seperti pemilihan umum maupun partisipasi dalam diskusi dan kegiatan politik lainnya. Dengan demikian, kerangka pikir ini menunjukkan hubungan langsung antara media sosial sebagai sarana interaksi sosial modern dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik dalam masyarakat.

Maka dari itu, peneliti menyusun kerangka pikir sebagai berikut:



1.7 Definisi Operasional Variabel

Dalam definisi operasional variabel, variabel yang akan diteliti, bersama dengan indikatornya, didefinisikan, diuraikan, dan dijelaskan. Definisi ini mencakup:

1. Media Sosial (X)

Media sosial merujuk pada platform daring seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter, yang digunakan oleh Generasi Z untuk mengakses, berbagi, dan berinteraksi dengan konten politik, serta mengikuti isu-isu politik terkait Pemilu 2024.

2. Partisipasi Politik (Y)

Partisipasi politik mencakup keterlibatan aktif dalam proses politik, seperti mengikuti kampanye, berbagi informasi politik, berdiskusi, dan memberikan suara dalam Pemilu 2024 melalui media sosial atau cara lainnya.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Variabel Independen (X)

No.	Variabel Independen (X)	Dimensi	Indikator	Skala Ukur	Pertanyaan
1	Media Sosial	Partisipasi	Frekuensi individu membuat postingan, berkomentar, dan membagikan terhadap konten politik di media sosial mencerminkan tingkat partisipasi mereka dalam diskusi politik online.	Likert	2

		Keterbukaan	Kesediaan individu untuk mengikuti akun dari berbagai latar belakang politik dan berdiskusi dengan pandangan berbeda menunjukkan tingkat keterbukaan mereka terhadap beragam perspektif politik	Likert	2
		Percakapan	Intensitas dan kualitas diskusi politik yang ditandai dengan komentar yang panjang, penggunaan sumber yang relevan, serta adanya saling pengertian, mencerminkan tingkat keterlibatan individu dalam percakapan politik yang mendalam	Likert	2

		Komunitas	Keanggotaan dan aktivitas dalam komunitas politik <i>online</i> serta pengaruh komunitas terhadap pandangan politik menunjukkan tingkat keterlibatan individu dalam jaringan sosial politik	Likert	2
		Saling Terhubung	Luas dan keragaman jaringan sosial serta pengaruh jaringan terhadap pilihan politik mencerminkan tingkat konektivitas individu dalam ekosistem informasi politik	Likert	2

Tabel 1.3 Operasionalisasi Variabel Dependen (Y)

No.	Variabel Dependen (Y)	Dimensi	Indikator	Skala Ukur	Pertanyaan
1.	Partisipasi Politik	Pemberian Suara	Tindakan nyata dalam menyalurkan hak pilih.	Likert	3
		Kegiatan Kampanye	Keterlibatan aktif dalam berbagai bentuk kegiatan kampanye.	Likert	2
		Diskusi politik	Partisipasi aktif dalam pertukaran ide dan pendapat terkait politik.	Likert	3
		Kelompok kepentingan	Keterlibatan dalam organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan politik tertentu.	Likert	2

1.8 Hipotesis

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga peneliti merumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha : Penggunaan Media sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik generasi z dalam Pemilu 2024

Ho : Penggunaan Media sosial tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik generasi z dalam Pemilu 2024

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode kuantitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk menggambarkan data secara objektif sesuai dengan kondisi yang ada. **Metode kuantitatif** merupakan jenis penelitian yang sering disebut juga sebagai **metode penelitian naturalistik**, karena dilakukan dalam kondisi alamiah, tanpa adanya manipulasi atau kontrol terhadap variabel-variabel yang ada. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data berbentuk angka atau statistik, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mengungkap makna yang terkandung di balik data tersebut.

Pendekatan **kuantitatif deskriptif** berfokus pada penyajian data secara rinci dan sistematis, tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis atau hubungan sebab-akibat. Peneliti hanya menggambarkan fenomena yang

terjadi, kemudian menganalisis makna dan implikasi dari fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain, metode ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang sedang diteliti dan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

1.9.2 Populasi dan Sampel Penelitian

1.9.2.1 Populasi

Populasi merupakan suatu **area generalisasi** yang mencakup seluruh subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa individu, kelompok, benda, peristiwa, atau fenomena tertentu yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan elemen yang relevan dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2013:90). Penelitian ini memanfaatkan 5.891.384 sampel dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Generasi Z di Jawa Tengah sebagai populasi penelitian (KPU, 2024).

1.9.2.2 Sampel

Sumber data penelitian pada dasarnya berasal dari dua hal utama, yaitu **populasi** dan **sampel**. **Populasi** merujuk pada keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi ruang lingkup penelitian. Sementara itu, **sampel** adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut, dengan tujuan untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel digunakan agar

penelitian menjadi lebih efisien tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi, namun tetap memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel acak sederhana digunakan. Keputusan tentang siapa dan berapa banyak sampel yang diambil oleh peneliti adalah yang paling penting. Dengan metode pengambilan sampel ini, peneliti secara eksklusif memilih semua orang yang tersedia saat penelitian dilakukan sebagai responden.

Dalam penelitian ini, setiap elemen memiliki kesempatan yang sama untuk diketahui dan dipilih sebagai sampel yang dipilih secara acak. Rumus penarikan sampel Slovin

$$S = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan :

S: Jumlah sampel, yaitu bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan dalam penelitian.

N: Jumlah populasi, yaitu keseluruhan subjek atau objek yang menjadi ruang lingkup penelitian.

e: *margin of error*, yaitu batas toleransi kesalahan dalam pengambilan sampel yang dinyatakan dalam persentase. Nilai ini biasanya dipangkatkan dua (e^2) dalam perhitungan untuk menghitung tingkat ketelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan perkiraan tingkat kesalahan sebesar 10% (0,1).

$$S = \frac{5.891.384}{1 + 5.891.384 \cdot 0,1^2}$$

$$S = \frac{147.284.600}{1.472.871}$$

S = 99,99 dibulatkan menjadi 100

Maka didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel acak kelompok. Beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang telah dievaluasi dan dapat mewakili populasi penelitian dipilih sebagai sampel. Peneliti juga mempertimbangkan luas daerah populasi, biaya, dan waktu saat memilih teknik pengambilan sampel.

1.9.4 Sumber Data

Data bisa dikumpulkan dari dua sumber, yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Pasolong (2013:70). Dalam penelitian ini, data primer didapat dari kuesioner baik secara online maupun langsung pada responden melalui link google form.

2. Data Sekunder

Data yang tak langsung ditemukan dari subjek penelitian disebutnya data sekunder, menurut Pasolong (2013). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder termasuk literatur, buku--buku, artikel, jurnal, dan situs web yang berkaitan dengan subjek penelitian.

1.9.5 Skala Pengukuran

Nilai variabel dapat diukur dan ditulis dalam bentuk angka, sehingga hasilnya lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Skala likert adalah skala yang digunakan.

Pendapat, sikap, dan persepsi responden tentang masalah yang menjadi variabel penelitian diukur melalui skala Likert, yang terdiri dari variabel X dan Y. Ada lima pilihan jawaban untuk setiap item pertanyaan, yaitu:

1. Sangat Setuju (SS): skor 5
2. Setuju (S): skor 4
3. Netral (N): skor 3
4. Tidak Setuju (TS): skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS): skor 1

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan **membuat kisi-kisi instrumen penelitian** untuk mempermudah proses pengumpulan

data. Kisi-kisi ini bertujuan untuk menyusun instrumen yang akan digunakan dalam mengukur variabel yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa instrumen tersebut relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah variabel yang ditetapkan akan menentukan jumlah instrumen penelitian yang dibuat.

Fokus penelitian ini adalah "**PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DALAM PEMILU 2024 DI JAWA TENGAH**", sehingga peneliti akan menggunakan dua instrumen utama, yaitu:

1. **Instrumen untuk mengukur variabel media sosial** (variabel X), yang akan mengevaluasi penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik.
2. **Instrumen untuk mengukur variabel partisipasi politik** (variabel Y), yang akan menilai tingkat partisipasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024.

Metode **pengumpulan data yang dipilih adalah kuesioner**, yang merupakan alat yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membuat dua kuesioner terpisah: satunya untuk mengumpulkan data terkait penggunaan media sosial, dan satu lagi untuk mengumpulkan data terkait partisipasi politik. Kedua kuesioner ini dirancang dengan menggunakan **skala pengukuran** yang sesuai untuk menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik.

Untuk memudahkan pengisian dan pengumpulan data, peneliti memilih **bentuk checklist** dalam kuesioner. Peserta hanya perlu memberi tanda centang (\surd) pada pilihan yang sesuai dengan jawaban mereka. Dengan cara ini, pengumpulan data menjadi lebih efisien dan sistematis, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut terhadap hubungan antara variabel media sosial dan partisipasi politik dalam penelitian ini.

1.9.7 Teknik Pengabsahan Data

1. Uji validitas

Peneliti akan menguji validitas konstruk dan isi (validitas konstruk) untuk mengetahui apakah konstruk atau karakteristik (variabel laten) penelitian ini, yaitu variabel media sosial dan partisipasi politik, dapat diukur dengan benar dengan menggunakan indikator indikatornya. Peneliti akan melakukan uji validitas dengan menggunakan program SPSS. Karena responden penelitian adalah sampel tak jenuh, atau sebagian populasi, dari 100 orang yang disurvei, maka uji validitas cukup dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel Product Moment (terlampir). Indikator atau pertanyaan kuesioner dianggap valid jika nilai hitung lebih besar dari tabel. Sebaliknya, berlaku sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Peneliti akan menguji reliabilitas konsistensi internal (*internal consistency*) dengan menguji setiap elemen yang ada

dalam kuesioner penelitian menggunakan teknik Belah Dua (*Split Half*) dari Spearman Brown. Jika Ralpa memiliki nilai lebih dari 0,6, maka indikator atau pertanyaan kuesioner dianggap reliabel, begitu pula sebaliknya.

1.9.8 Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Teknik ini bertujuan untuk membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum atau **generalisasi** mengenai karakteristik data yang ada.

Dalam penelitian ini, teknik **analisis statistik deskriptif** mencakup beberapa langkah, antara lain:

1. **Tabel:** Untuk menyajikan data secara sistematis dan memudahkan pembacaan.
2. **Modus:** Untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam data.
3. **Median:** Untuk menentukan nilai tengah dari data yang terurut.
4. **Mean (rata-rata):** Untuk menghitung nilai rata-rata dari semua data yang ada, sebagai ukuran tendensi sentral yang menunjukkan nilai rata-rata.

5. **Perhitungan rata-rata dan persentase:** Untuk menyajikan informasi kuantitatif secara lebih mudah dipahami.

Untuk menghitung **persentase** dari data hasil kuesioner pada masing-masing variabel, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

- n = Skor yang diperoleh (jumlah responden yang memilih jawaban tertentu).
- N = Skor ideal (jumlah total responden atau total nilai yang mungkin).
- % = Persentase dari skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor ideal.

Rumus ini memungkinkan peneliti untuk menghitung persentase frekuensi jawaban pada setiap item kuesioner, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pola responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat kalimat yang bersifat kualitatif, yakni hasil persentase itu dapat digolongkan sesuai dengan Tabel 1.4:

Tabel 1.4 Kriteria Jawaban Responden

Presentase Jawaban	Keterangan
80% - 100%	Sangat Baik
60% - < 80%	Baik
40% - < 60%	Cukup Baik
20% - < 40%	Kurang Baik
0% - < 20%	Sangat Tidak Baik

Sumber : (Arikunto, 2010)

2. Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk menganalisis dampak variabel **media sosial** terhadap **partisipasi politik**, digunakan **analisis regresi sederhana**. Analisis regresi ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara kedua variabel dan untuk membuat **perkiraan** atau prediksi tentang bagaimana perubahan pada variabel media sosial akan mempengaruhi partisipasi politik.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan rumus:

\hat{Y} = variabel **partisipasi politik** yang diprediksi.

X = variabel **media sosial** yang berperan sebagai prediktor

a = **konstanta** atau nilai *intercept*, yaitu nilai prediksi partisipasi politik ketika nilai media sosial (X) sama dengan nol

b = **koefisien regresi**, yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada partisipasi politik (\hat{Y}) jika terjadi perubahan pada media sosial (X).

Analisis regresi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak **SPSS**. Dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat memperoleh nilai koefisien regresi serta hasil yang akan digunakan untuk menguji **hipotesis penelitian**.

Untuk menguji hipotesis, dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. **Jika nilai P value (sig) $\geq 0,05$** , maka **H_a** (hipotesis alternatif) ditolak dan **H₀** (hipotesis nol) diterima, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel media sosial dan partisipasi politik.

- b. **Jika nilai P value (sig) $\leq 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel media sosial dan partisipasi politik.**

Dengan demikian, uji hipotesis ini akan membantu peneliti untuk menentukan apakah media sosial secara signifikan mempengaruhi partisipasi politik atau tidak.